



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang

- Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri A No.7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

- Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 2.445.490.278.577,00 bertambah sejumlah Rp 89.407.932.845,00 sehingga menjadi Rp 2.534.898.211.422,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp 2.336.980.510.799,00
b. Berkurang	<u>(Rp 3.074.561.683,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 2.333.905.949.116,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 2.445.490.278.577,00
b. Bertambah	<u>Rp 89.407.932.845,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 2.534.898.211.422,00

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp	200.992.262.306,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	116.009.767.778,00
2) Bertambah	Rp	<u>96.482.494.528,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	212.492.262.306,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	7.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>4.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	11.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	200.992.262.306,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	(Rp	0,00)

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 414.115.747.429,00 |
| 2) Berkurang | (Rp | <u>1.603.029.791,00</u>) |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp | 412.512.717.638,00 |
- a. Dana perimbangan
- | | | |
|---|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.383.517.058.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | Rp | 1.383.517.058.000,00 |
- b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 539.347.705.370,00 |
| 2) Berkurang | (Rp | <u>1.471.531.892,00</u>) |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp | 537.876.173.478,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 163.698.650.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah Perubahan | Rp | 163.698.650.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|---|----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 23.754.040.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>850.000.000,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan | Rp | 24.604.040.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 19.129.716.400,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp | 19.129.716.400,00 |

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp	207.533.341.029,00
2) Berkurang	(Rp	<u>2.453.029.791,00</u>)
Jumlah lain-lain	Rp	205.080.311.238,00
pendapatan asli daerah		
yang sah setelah Perubahan		
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak		
1) Semula	Rp	49.322.444.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil	Rp	49.322.444.000,00
setelah Perubahan		
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp	994.229.255.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum	Rp	994.229.255.000,00
setelah Perubahan		
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp	339.965.359.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus	Rp	339.965.359.000,00
setelah Perubahan		
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp	87.396.650.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.660.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan hibah	Rp	92.056.650.000,00
setelah Perubahan		
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat	Rp	0,00
setelah Perubahan		
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
1) Semula	Rp	175.059.944.370,00
2) Berkurang	(Rp	<u>19.701.531.892,00</u>)
Jumlah Bagi Hasil Pajak	Rp	155.358.412.478,00
dari Provinsi setelah Perubahan		
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp	36.454.064.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian	Rp	36.454.064.000,00
dan Otonomi Khusus setelah		
Perubahan		
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>13.570.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan	Rp	13.570.000.000,00
dari Provinsi setelah Perubahan		
f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah		
1) Semula	Rp	240.437.047.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan	Rp	240.437.047.000,00

dari Pemerintah setelah
Perubahan

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp 1.441.425.167.154,00
 - 2) Berkurang (Rp 434.018.524,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 1.440.991.148.630,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp 1.004.065.111.423,00
 - 2) Bertambah Rp 89.841.951.369,00
 - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.093.907.062.792,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 1.001.412.417.374,00
 - 2) Bertambah Rp 4.311.981.276,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 1.005.724.398.850,00
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00
 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00
 - d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp 51.609.800.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.469.000.000,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 53.078.800.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp 3.150.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 3.150.000.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp 20.953.517.880,00
 - 2) Bertambah Rp 85.000.000,00
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp 21.038.517.880,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp 360.799.431.900,00

2) Berkurang	(Rp	<u>7.300.000.000,00</u>)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp	353.499.431.900,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	3.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga setelah Perubahan	Rp	4.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	75.327.491.396,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.103.732.125,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	76.431.223.521,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	655.048.425.722,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>41.559.770.131,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	696.608.195.853,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	273.689.189.305,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>47.178.449.113,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	320.867.643.418,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp	116.009.767.778,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>96.482.494.528,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	212.492.262.306,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	7.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	11.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp	116.009.767.778,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>96.482.494.528,00</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	212.492.262.306,00
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pencairan dana	Rp	0,00
cadangan setelah Perubahan		
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil penjualan	Rp	0,00
kekayaan daerah yang dipisahkan		
setelah Perubahan		
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan	Rp	0,00
pinjaman daerah setelah Perubahan		
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan	Rp	0,00
Kembali pemberian pinjaman		
setelah Perubahan		
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang	Rp	0,00
Daerah setelah perubahan		
g. Penerimaan kembali dana cadangan tujuan dari Bank		
Jateng/BPD sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang	Rp	0,00
Daerah setelah perubahan		
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	7.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan dana	Rp	7.500.000.000,00
cadangan setelah Perubahan		
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.000.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal	Rp	4.000.000.000,00
(Investasi) Pemerintah Daerah		
setelah Perubahan		
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran cicilan	Rp	0,00
pokok utang yang jatuh tempo		
setelah perubahan		
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman	Rp	0,00
daerah dan obligasi setelah		
Perubahan		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - a. Lampiran VII.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - b. Lampiran VII.2 Neraca Daerah;
 - c. Lampiran VII.3 Laporan Arus Kas;
 - d. Lampiran VII.4 Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran VII.5 Laporan Operasional;
 - f. Lampiran VII.6 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
10. Lampiran X Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 16 Oktober 2019

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (6-329/2019)